

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.WG.2307/2020
Lampiran : 1 lembar

Jakarta, 26 Maret 2020

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower, Lt.6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 51-53
Jakarta Selatan 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (“Perseroan”)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 jo Pasal 16 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 32**”), bersama ini kami sampaikan Bukti Ralat Iklan Pemanggilan RUPST Perseroan yang telah dimuat di surat kabar Bisnis Indonesia pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
Sekretariat



Bobby Iman Setya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan :
Kepala Divisi Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.

| PROTEKSI PEKERJA MEDIS VIRUS CORONA |

MEMANUSIAKAN PAHLAWAN KEMANUSIAAN

Cuitan Pandu Riono mendadak ramai direspons masyarakat di jagat Twitter. Ahli kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu menuliskan ucapan bela sungkawa atas kematian kakak iparnya, dr. Djoko Judodjoko, yang menangani pasien positif COVID-19.

Dewi A. Zuhriyah
dewi.zuhriyah@bisnis.com

“**S**alamat jalan mas Koko, maafkan saya belum berhasil mendorong agar pemerintah @jokowi serius mengatasi pandemi COVID-19. Mas terinfeksi karena aktif beri layanan. Banyak petugas kesehatan yang terinfeksi dan pergi, minimnya APD [alat pelindung diri] sulit dimaafkan. Tidak cukup bicara, kita semua berbuat,” urainya di laman Twitter, Sabtu (21/3).

Dokter Djoko merupakan salah satu dari enam tenaga medis yang meninggal dunia akibat tertular virus yang menjadi momok dunia tersebut. Kematian para tenaga medis itu seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang hingga ini belum memberikan perlindungan penuh bagi mereka.

Sejak awal adanya pandemi ini, fokus pemerintah justru tertuju pada para pengusaha dan orang berduit lainnya. Alih-alih memprioritaskan kesehatan dan kesiapan rumah sakit beserta awak medisnya, pemerintah memikirkan bagaimana agar pariwisata Indonesia tak terpuruk.

Pandemi ini sebetulnya bisa

diatasi jika sejak awal pemerintah sigap dan mulai waspada terhadap COVID-19 jauh sebelum ada masyarakat Indonesia yang positif terjangkit, alih-alih menjadikan virus corona ini sebagai ‘joke’. Masih teringat jelas ketika Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan entengnya berkelakar kalau virus ini bisa sembuh sendiri asal rajin minum jamu.

Kini nasi sudah menjadi bubur. Hal yang perlu dilakukan pemerintah sebagai bentuk ‘penebusan dosa’ bisa dimulai dari memastikan perlindungan kepada tenaga medis yang bertugas menangani pasien COVID-19.

KELANGKAAN APD

Salah satu bentuk perlindungan itu adalah dengan memberikan bantuan alat pelindung diri (APD). Pasalnya, sejak COVID-19 melanda RI, tidak hanya masker dan cairan sanitasi tangan saja yang mendadak langka, APD bagi tenaga medis pun terbatas.

Ekonom Indef Abra Talattov berpendapat dalam upaya mengatasi COVID-19, jangan

sampai insentif yang diberikan pemerintah justru salah resep atau tidak tepat sasaran. “Mereka [para pekerja medis] sudah bertarung nyawa, tetapi malah APD-nya *enggak* ada. Jangan sampai pemerintah salah kasih resep untuk mengatasi hal ini. *Enggak* cukup hanya dengan menenangkan masyarakat, tetapi juga harus menjamin keamanan para awak medis.”

Menkes Terawan mengklaim pemerintah tidak lepas tangan terhadap tenaga medis. Salah satu bentuk kepeduliannya adanya dengan menyisir pabrik-pabrik produsen APD.

Namun, terkait dengan

berapa banyak pabrik yang bisa memproduksi APD, dia mengaku tidak tahu-menahu soal itu. “Saya hanya diinformasikan dari Gugus Tugas tanpa diberitahu nama perusahaan.”

Ketua Umum Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia Hasbullah Thabrany menuturkan ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap para tenaga medis. *Pertama*, dengan mencukupi pasokan APD. *Kedua*, membayar jaminan kecelakaan kerja bagi yang gugur dalam bertugas. *Ketiga*, memberikan santunan beasiswa pada anak-anak tenaga kesehatan korban COVID-19 sampai kuliah.

Sekjen
Pengurus
Besar
Ikatan



Dokter Indonesia (IDI) Muhammad Adib Khumaidi mengaku tengah menginvestigasi kematian para dokter yang menangani pasien COVID-19. Dari enam dokter yang diberitakan meninggal, ternyata ada satu yang tidak disebabkan oleh virus berbahaya tersebut, yakni almarhum dr. Toni Daniel Silitonga.

Adib mengatakan IDI saat ini menginvestigasi apakah lima dokter lainnya tertular dari pasien saat proses pengobatan atau karena faktor lain, seperti berkunjung ke negeri yang tertular virus corona atau dalam proses perjalanan/kegiatan yang kontak dengan orang positif corona.

“Memang benar ada lima dokter yang meninggal karena COVID-19, tetapi soal apakah secara langsung tertular corona saat menangani pasien, ini masih dalam investigasi,” katanya.

Apapun hasil investigasi yang dilakukan oleh IDI, kematian para petugas medis yang menangani pandemi ini seyogianya bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menanggapi suatu kejadian. Jangan sampai sikap lengah dan kesan meremehkan ini berujung pada petaka bagi masyarakat Indonesia. □

STOK BERAS AMAN



Bisnis/Himawan L. Nugraha

Pekerja melakukan proses bongkar muat beras ke kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Selasa (24/3). Pemerintah menyampaikan stok beras aman guna menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini tersedia sebanyak 3,5 juta ton stok beras yang tersebar di Perum Bulog, penggilingan serta pedagang, dan panen raya diperkirakan pada Maret, April dan Mei 2020 sehingga pada akhir Mei 2020 akan terdapat stok beras sebesar 7,7 juta ton.

| UPAYA PENANGANAN COVID-19 |

77 BLK Dikerahkan

Bisnis, JAKARTA — Guna mencegah perluasan pandemi COVID-19, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengoptimalkan fasilitas 77 balai latihan kerja (BLK) sebagai sentra pencegahan wabah tersebut.

Balai-balai tersebut diarahkan untuk menggelar pelatihan dan produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, cairan sanitasi tangan, sabun, dan sebagainya.

“Seluruh komponen Kemenaker dari tingkat pusat hingga daerah, juga para atase ketenagakerjaan di negara-negara penempatan, terus aktif dalam upaya antisipasi dan pencegahan penyebaran COVID-19,” kata Ida, Rabu (25/3).

Dia menyebutkan saat ini ada 77 BLK yang memiliki program kejuruan menjahit, dengan rincian 14 BLK milik pemerintah pusat dan 63 BLK milik pemerintah daerah. Seluruhnya akan diarahkan untuk mengoptimalkan pembuatan masker dan cairan sanitasi tangan.

Adapun, BLK Kemenaker saat ini telah mulai melakukan langkah-langkah tersebut. Salah satunya BLK Padang yang telah

melakukan uji coba pelatihan memproduksi 2.200 masker dan 1.500 liter cairan sanitasi tangan per harinya. Metode pelatihan serupa nantinya akan diterapkan di 77 BLK.

Ke depannya, jelas Ida, setelah mengikuti rangkaian pelatihan, para peserta bisa bekerja di tempatnya masing-masing dan dapat menjual berbagai hasil pelatihan ke masyarakat dengan harga terjangkau. Tujuannya agar peserta BLK tidak hanya membantu pencegahan penyebaran COVID-19, tetapi juga mendapatkan kesempatan kerja. Untuk membantu masyarakat dalam akses modal, upah, pengembangan produk, hingga pemasaran, Kemenaker telah menyiapkan skema bantuan program padat karya/Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani menuturkan saat ini pengusaha juga getol berkontribusi dalam aksi melawan corona.

“Sekarang ini kami gotong royong juga untuk menyumbang, kami lagi berkoordinasi untuk memberikan sumbangan.” (Dewi A. Zuhriyah)

WIKAGedung

RALAT PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG Tbk.

Direksi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini bermaksud memberitahukan mengenai **perubahan informasi** (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan yang telah dimuat di surat kabar Bisnis Indonesia pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, yaitu mengenai perubahan tempat penyelenggaraan RUPS Tahunan Perseroan sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap penyebaran Corona Virus COVID-19, menjadi sebagai berikut:

Hari, tanggal : Selasa, 31 Maret 2020

Tempat : Best Western Premier The Hive, Lt. 3

Jalan D.I. Panjaitan Kav. 3-4, RT.7/RW.11, Cipinang Cempedak

Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Jakarta 13340

Waktu : 14.00 WIB - Selesai

Catatan:

- Berkenaan telah dikeluarkannya prosedur pengurangan penyebaran Corona Virus (COVID-19), yaitu dengan pemberian batasan-batasan pada kegiatan keramaian, serta mengacu kepada prosedur BNPB, Pemprov DKI, dan Building Management, maka untuk memastikan pelaksanaan Rapat dapat berjalan aman, efisien, Rapat akan dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19 dimaksud.
- Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan www.wikagedung.co.id mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal Rapat.
- Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 6 Maret 2020.
- Pemegang saham yang tidak hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.wikagedung.co.id, atau dapat diperoleh langsung pada jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang telah ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp. (021) 3508077, dan semua Surat Kuasa dimaksud harus sudah diterima oleh Perseroan melalui Kantor BAE tersebut atau melalui email ke DM@datindo.com atau corsec@wikagedung.co.id
- Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, dimohon agar membawa fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran.
 - Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir.
 - Bagi pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana Pemegang Saham berdomisili.
- Pemegang Saham yang dapat hadir pada hari Rapat adalah yang telah diukur suhunya, telah mengisi deklarasi kesehatan, dan menandatangani pernyataan, serta dinyatakan aman dan sehat oleh Panitia. Pemegang Saham yang dinyatakan aman dan sehat tersebut tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa kepada BAE atau pihak lain sebelum pelaksanaan RUPS dimulai, sehingga tidak perlu hadir dalam Rapat. Namun apabila Pemegang Saham tetap memutuskan hadir pada Rapat, maka sesuai Tatib, Pemegang Saham dapat hadir di Ruang Rapat yang disediakan untuk menyaksikan jalannya Rapat, dengan tetap tidak mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham sesuai Peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 26 Maret 2019

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.

Direksi